

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, A. &. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstittusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Jimly Asshiddiqie, Konstittusi dan KonstituSekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bakri, M. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: UB Press.
- Chazawi, A. (2005). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. F. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Constanzo, M. (2006). *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eddy, O. H. (2008). *Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ferdian, A. C. (2016). *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gultom, M. (2014 ). *Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pi Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama .
- Hamid, Hamrad. (2001). *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan dan Penerapan Permasalahan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Harun M. (2003). *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Marpaung, L. (2014). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Najih, M. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Pers.
- Nitibaskara, T. R. (2006). *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Nugroho, H. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadjijono. (2008). *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Salam, M. F. (2001). *Hukum Acara Pidana dalam teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharsil, M. T. (2004). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutarto, S. (2005). *Hukum Acara Pidana Jilid 1*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Utomo, H. H. (2002). *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: LPIP Pers.
- Widiaratna, A. W. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.  
Zulpa, T. S. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Jurnal :**

Muhammad Schinggyt Tryan P, N. S. (2016). "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana". *Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.4*, 4-6.

Nugraha, Randy Ferdian. (Maret 2016). "Teknik Penyidik Dalam Mencari Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Polresta Padang". *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1*.

Prabowo, Agung Setyo. (Desember 2015). "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Ngawi". *Jurnal Hukum, Vol.12, No.4*.

Rangga Sasmita, S. (April 2011). "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kota Mataram)". *Jurnal Law Reform, Vol. 6 No.1*, 55-56.

Suharyanti, N. P. (September 2015). "Perspektif Hak Asasi Manusia Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah". *Jurnal Advokasi Volume 5 No. 2*, 25.

Winarno, N. B. (2011). "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian". *Jurnal Perspektif, Vol.XVI, No.2*, 2011.

W, U. A. (September 2017). Analisis Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus. *Jurnal Reformasi Hukum, Vol.1, No.1*, 32.

**Peraturan Perundang – Undangan :**

Indonesia , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_, Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

**Sumber Lain :**

Data Primer diolah dari hasil wawancara dengan Ipda Catur Kurniawan, S.H. selaku Kaurmintu Satreskrim di Polres Bogor pada tanggal 30 April 2019, Lokasi di Polres Bogor.

<https://www.beritasatu.com/satu/483485-polres-bogor-amankan-sindikat-pemalsu-surat-kendaraan-dan-ktp.html>. Di akses pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 15.00 WIB.